

**ANALISIS KELEMBAGAAN PENYULUHAN PERTANIAN
DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

**ANALYSIS OF INSTITUTIONAL AGRICULTURAL EXTENSION
IN KUANTAN SINGINGI**

Dicky Hendy Putra¹, Roza Yulida², Eri Sayamar²
Agribusiness Department, Agriculture Faculty, University of Riau
Dicky_hendy@ymail.com/085365896057

ABSTRACT

The extension are contribute in order to increase the productivity, production and income of the farming communities. But lately, the existence of extension institution are decrease that cause by vary factors. In Riau Province, the implementation of agricultural extension in Kuantan Singingi district at level of sub-district are under management of sub-department or Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD). This research are intend to reviewing the vision and mission, to analyze the duty and fuction based on existing structure on the institution of each department at Kuantan Singingi district, reviewing the existing rule and policy on each department at Kuantan Singingi district.

The result of the research shows that all department has vision and mission which is descript the performance that will be achieve for the next 5 year period since the vision and mission that published. Basically, the vision and mission that had made has shows the success from the time to the time, but still there are problems on achieve vision and mission. Meanwhile from programa agricultural extension, there is 1 department that doesn't make the programa of agricultural extension, which is on Fisheries department. Point out of the fifth departments has 1 Person as Head of Department, 1 Person as Secretary, 3 Person as Head of Divisions and some several person as section. Rule and policy that made by each department at Kuantan Singingi district, basically emphasize to increase the quality of administration of the institutional, public management, and the improvement of the knowledge of human resources as well as at the department environment or on the farm level.

PENDAHULUAN

Dalam upaya menciptakan kemandirian pangan, pemerintah berusaha agar pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri dan meminimalisasi impor, melalui optimalisasi sumberdaya domestik dan lokal. Sehingga strategi yang ditempuh untuk mencapai sasaran kemandirian pangan tersebut adalah memprioritaskan pembangunan

ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat (Dewan Ketahanan Pangan, 2006).

Penyuluhan berkontribusi besar dalam peningkatan produktivitas, produksi dan pendapatan masyarakat tani. Hanya saja, akhir-akhir ini terasa keberadaan lembaga penyuluhan semakin merosot yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain : a)

-
1. Mahasiswa Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau
 2. Staf Pengajar Fakultas Pertanian Universitas

program yang lemah; b) kuantitas penyuluh yang kurang berkembang; c) kualitas penyuluh cenderung kurang berkembang; d) fasilitas yang semakin terbatas; e) perhatian pemerintah ; terutama pemerintah daerah yang semakin lemah (Hafisah, 2006).

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 dan diamandemen dengan Undang-undang No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mengubah pranata dan struktur lembaga penyuluhan pertanian. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 beserta perangkat peraturan perundangan dibawahnya menyebabkan kelembagaan penyuluhan pertanian di Provinsi Riau mengalami perubahan bersama (*co-evolution*) pranata sosial kelembagaan penyuluhan baik di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan (Syabrina, 2009).

Di Provinsi Riau penyelenggaraan penyuluhan pertanian beraneka ragam seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi penyelenggaraan penyuluh pada tingkat kecamatan berada dibawah naungan Sub Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Kabupaten Kuantan Singingi yang menjadi salah satu basis pembangunan pertanian di Provinsi Riau memiliki total keseluruhan jumlah penyuluh 198 orang yang tersebar di 15 Kecamatan. Kelembagaan yang beragam ini, menunjukkan bahwa beragamnya persepsi provinsi/kabupaten/kota tentang posisi dan peran strategis kelembagaan penyuluhan pertanian di wilayah masing-masing (Departemen Pertanian, 2005).

Kondisi kelembagaan yang sangat beragam ini mempengaruhi kinerja penyelenggaraan penyuluhan dan konsekuensinya berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Berdasarkan uraian di atas maka dilakukan studi dengan judul ‘Analisis Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi’. Studi ini bertujuan untuk mengkaji visi dan misi, menganalisis tugas dan fungsi berdasarkan struktur yang ada di lembaga masing-masing Dinas di Kabupaten Kuantan Singingi, mengkaji aturan dan kebijakan yang ada terkait dengan penyuluhan pertanian, serta mengkaji program masing-masing Dinas di Kabupaten Kuantan Singingi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, Pelaksanaan penelitian dimulai dari bulan Juni 2015 sampai dengan bulan Mei 2016 dimulai dengan survei lapangan, penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data hingga publikasi hasil penelitian. Alasan mengambil penelitian di daerah Kabupaten Kuantan Singingi karena Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi yang belum menerapkan UU no 16 Tahun 2006. Penyuluh Pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi bernaung di berbagai instansi, yaitu Dinas Tanaman Pangan, Dinas Perkebunan, Dinas Perikanan, Dinas Kehutanan, Dinas Peternakan.

Metode pengambilan sampel dengan menggunakan Metode Purposive Sampel yang dimana kriteria yang dipakai adalah koordinator penyuluh. Koordinator penyuluh dalam hal ini adalah kepala bidang penyuluhan di setiap Dinas

yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui metoda wawancara terstruktur menggunakan kuesioner. Sedangkan data sekunder yang

diperoleh dengan mengamati dokumen dari laporan-laporan dari instansi terkait. Serta data-data terkait dengan potensi daerah. Adapun panduan untuk menjawab masing-masing tujuan terkait dapat kita lihat pada tabel 1.

Tujuan	Key Person	Paduan Wawancara
1. Mengkaji visi dan misi masing-masing dinas	Kepala Bidang Penyuluhan/ Kordinator penyuluh	Visi dan misi Program Unsur unsur Penyuluhan Jumlah Penyuluh Pertanian
2. Menganalisis peran dan fungsi berdasarkan struktur yang ada dilembaga masing masing	Bagian kepegawaian	Struktur lembaga Fungsi dan peran
3. Mengkaji aturan kebijakan yang ada terkait dengan penyuluhan	Kepala Bidang penyuluhan/ Kordinator penyuluh	Kebijakan yang ada dalam penyuluhan
4. Mengkaji Programa penyuluhan di masing-masing dinas	Kepala Bidang penyuluhan/ Kordinator penyuluh	Programa penyuluhan setiap dinas

Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang mendalam tentang satu atau beberapa fenomena sosial. Setiap gejala atau kondisi sosial tersebut diteliti secara luas dan mendalam dan kemudian dibuatkan gambaran, sehingga diperoleh suatu penjelasan yang luas tentang apa yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Visi dan Misi masing-masing Dinas di Kabupaten Kuantan Singingi

Visi dan misi Dinas Perikanan

Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten

Kuantan Singingi yaitu “Terwujudnya Perikanan Kuantan Singingi Yang Maju, Tangguh dan Didukung Oleh Industrialisasi Modern”. Kata “Maju” dapat diartikan mampu menghadapi tantangan atau kendala dan menyesuaikan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada khususnya dibidang perikanan. Perikanan yang “Tangguh” dapat diartikan sebagai peningkatan kuantitas dan kualitas manajemen serta kemampuan untuk melakukan usaha secara mandiri dan memanfaatkan peluang pasar. “Perikanan Tangguh” juga dapat dicirikan dengan tingkat daya saing untuk menerobos pangsa pasar dan memberikan pelayanan secara profesional. “Industrialisasi Modern”

dimaknai adanya industrialisasi yang mendukung kegiatan perikanan mulai dari sektor hulu sampai ke sektor hilir dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan.

Misi Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi adalah : “Mensejahterakan Masyarakat Perikanan dengan Menjadikan Perikanan Sebagai Tulang Punggung dan Penggerak Perekonomian”, dari pernyataan misi Dinas Perikanan diatas Dinas Perikanan antusias bahwa sektor perikanan di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dijadikan sebagai tulang punggung ataupun sumber mata pencaharian yang cukup berpotensi guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ke arah yang lebih baik lagi. Adapun cara yang dapat dilakukan guna mencapai misi tersebut adalah melalui :

- a. Peningkatan produksi benih yang tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu dan tepat kualitas.
- b. Peningkatan keterampilan aparatur dan petani ikan.
- c. Menggalakkan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi perikanan.
- d. Peningkatan kualitas mutu dan hasil perikanan.
- e. Peningkatan produktivitas dan pelestarian perairan umum.

Selain poin-poin di atas misi utama Dinas Perikanan untuk saat ini yang dijelaskan Kordinator Penyuluh Dinas Perikanan adalah bagaimana mengubah pola pikir masyarakat yang saat ini masih sangat minim pengetahuan mengenai perikanan. Padahal potensi air dan sungai yang memadai di Kabupaten Kuantan Singingi sudah saatnya dijadikan sebagai sumber mata pencaharian

masyarakat. Kordinator Penyuluh Dinas Perikanan sendiri mengatakan misi yang dibuat oleh Dinas Perikanan belum semuanya sejalan dengan keadaan sebenarnya yang ada di masyarakat. Seperti bunyi pernyataan misi “Mensejahterakan Masyarakat Perikanan dengan Menjadikan Perikanan Sebagai Tulang Punggung dan Penggerak Perekonomian.

Visi dan Misi Dinas Kehutanan

Sejalan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan kehutanan, otonomi daerah dan kebijakan Departemen Kehutanan, maka visi penyuluhan kehutanan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi adalah “Terwujudnya Masyarakat Mandiri Berbasis Pengembangan Hutan” Masyarakat mandiri berbasis ekonomi lingkungan dan sosial dengan berbasis kepada sumber daya hutan dan lahan lingkungan yang lestari, serta pemahaman fungsi dan manfaat sebagai penyangga kehidupan, sehingga berpastipsipasi aktif dalam pelestarian sumber daya hutan dan pengelolaan DAS. Misi Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

1. Memantapkan dan mengembangkan Penyuluhan Kehutanan yang mendukung kebijakan pembangunan kehutanan
2. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dalam melestarikan Fungsi dan manfaat SDH untuk meningkatkan kesejahteraannya.
3. Memantapkan dan mengembangkan jaringan kerja dan kemitraan penyuluh dalam mendukung pembangunan kehutanan.

4. Memberdayakan masyarakat berbasis pembangunan kehutananan.

Visi dan Misi Dinas Peternakan

Visi yang ingin diwujudkan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Terwujudnya masyarakat Kuantan Singingi yang Sehat, Cerdas dan Produktif melalui Pembangunan Peternakan yang Tangguh dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal”

Sebagai salah satu daerah penghasil ternak terbesar di Provinsi Riau, Kabupaten Kuantan Singingi melalui Dinas Peternakan berusaha untuk tetap meningkatkan dan memperbaiki kualitas dari peternakan yang ada setiap tahunnya. Makna kata sehat, cerdas dan produktif adalah dengan konsumsi daging yang tinggi di lingkungan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi diharapkan memberi kualitas kesehatan yang baik, kecerdasan yang baik bagi anak usia dini dan produktivitas yang tinggi pula.

Selain itu visi dari Dinas Peternakan juga menjelaskan bahwa guna meningkatkan perekonomian suatu daerah hal utama yang harus dilakukan adalah dengan mengembangkan sumber daya lokal daerah itu terlebih dahulu dengan berusaha tidak menambah pasokan ternak dari luar daerah. Dengan demikian diharapkan setiap ternak yang beredar di Kabupaten Kuantan Singingi adalah produk lokal daerah itu sendiri.

Sementara itu melihat kondisi sumber daya lokal yang masih rendah perlu dilakukan pembinaan kelompok tani yang diharapkan dapat membantu menggali potensi,

memecahkan masalah usaha tani anggotanya secara lebih efektif dan memudahkan dalam mengakses informasi pasar. Dalam hal ini Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi membuat misi yang ingin diwujudkannya yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (Aparatur peternakan, peternak dan pelaku usaha peternakan)
- 2) Peningkatan populasi dan produksi ternak
- 3) Melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam pendukung peternakan
- 4) Peningkatan kualitas data dan informasi peternakan

Visi dan Misi Dinas Perkebunan

Visi yang ingin dicapai Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu “Mewujudkan Perkebunan Yang Efisien, Produktif, Berdaya Saing Tinggi dan Berkelanjutan.” Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi memiliki target pada Tahun 2020 visi tersebut harus bisa dicapai, yang manapernyataan Visi tersebut mengandung makna :

- 1) Perkebunan yang efisien
Perkebunan yang efisien artinya pembangunan dan pengembangan perkebunan dengan memanfaatkan lahan secara cermat, selektif serta mengutamakan pelestarian sumber daya alam.
- 2) Perkebunan yang produktif
Perkebunan yang produktif artinya pembangunan dan pengembangan perkebunan memakai sistem penggunaan bahan tanaman yang mempunyai kualitas dan kuantitas yang tinggi

- 3) Perkebunan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan

Perkebunan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan artinya pembangunan dan pengembangan perkebunan dapat menghasilkan produksi secara optimal dan memiliki kualitas yang tinggi serta sesuai dengan permintaan pasar.

- 4) Wawasan lingkungan

Pembangunan perkebunan terkait berwawasan lingkungan harus ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem dengan demikian perlu mengembangkan konsep keterpaduan dalam pengembangan berkelanjutan.

Selanjutnya guna mewujudkan visi serta memaksimalkan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi juga membuat misi yang harus dilaksanakan dengan baik agar visi dapat terlaksana sebagai mana mestinya. Adapun misi dari Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut

1. Mewujudkan birokrasi perkebunan yang profesional
2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia
3. Menyelenggarakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta pelayanan pada masyarakat
4. Meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu hasil dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
5. Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam melalui optimalisasi agribisnis yang berkelanjutan secara efisien dan efektif.
6. Mewujudkan dan menjamin keberadaan sumberdaya

perkebunan secara bijaksana melalui pemantapan penataan tata ruang yang dapat mendukung kadaan ekonomi, ketahanan sosial budaya dan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Visi dan Misi Dinas Tanaman Pangan

Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Visi yaitu “Sebagai Pengatur Handal Dalam Mewujudkan Agribisnis Tanaman Pangan Yang Maju 2016 di Kabupaten Kuantan Singingi”. Penjelasan makna “Pengatur Handal” adalah pemerintah dalam hal ini Dinas Tanaman Pangan Kuantan Singingi sebagai “Pengatur” yang mempunyai arti menjalankan fungsi stimulus, dinamisasi, regulasi, fasilitasi dan pengendalian, sedangkan “Handal” adalah upaya mewujudkan pertanian yang dinamis, fleksibel, ulet dan kuat menghadapi pasar regional dan global, dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya petani pada lingkungan fisik spesifik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

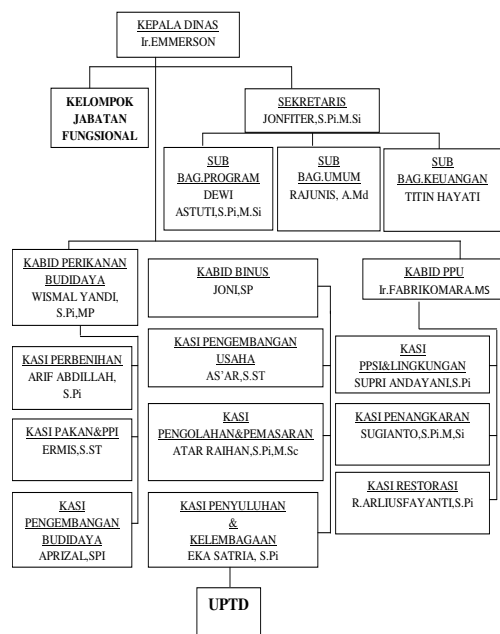
Misi Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi yaitu

- 1) Mewujudkan sumberdaya manusia pertanian tanaman pangan yang maju dan mandiri.
- 2) Mengembangkan pengaturan agribisnis tanaman pangan yang berdaya saing tinggi, ramah lingkungan dan berkerakyatan.
- 3) Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan untuk mendukung agribisnis tanaman pangan.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi

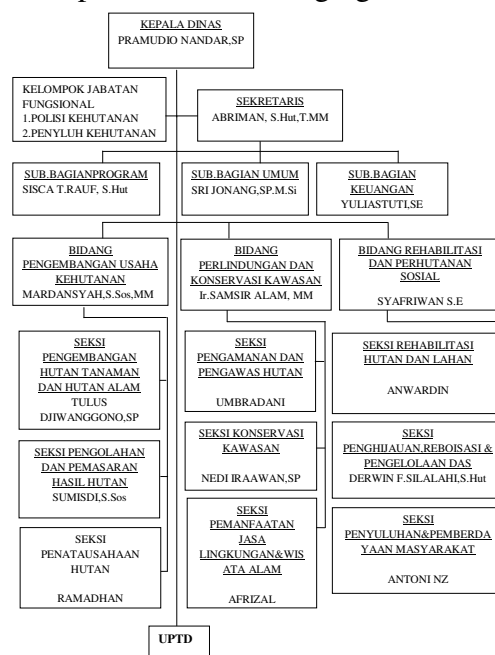
Dalam upaya penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan terbuka sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR No. XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No.28 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, maka Dinas Perikanan yang merupakan unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menyusun LAKIP sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan. Berikut uraian mengenai Struktur Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi



Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan di Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan Perda Nomor 04 Tahun 2008 adalah sebagai berikut “Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Perikanan”. Sementara Fungsi untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai Fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis lingkup perikanan;
- Pelaksanaan pelayanan umum di bidang perikanan;
- Pembinaan teknis di bidang Perikanan;
- Pembinaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dinas dan cabang dinas di bidang perikanan;

Struktur Organisasi Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi



Tugas pokok dari Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Kehutanan adalah Penyiapan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu mengenai fungsi dari Kepala Seksi Penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dijabarkan sebagai berikut :

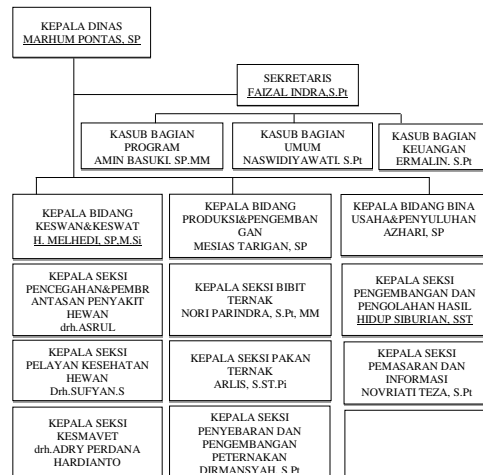
1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

2. Penyiapan dan penyusunan rencana program dan anggaran penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat
3. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat
4. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat
5. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan supervisi dan fasilitasi penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat.

Tugas dari seorang Kepala Seksi Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yang merupakan tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh bapak Antoni NZ dijabarkan sebagai berikut :

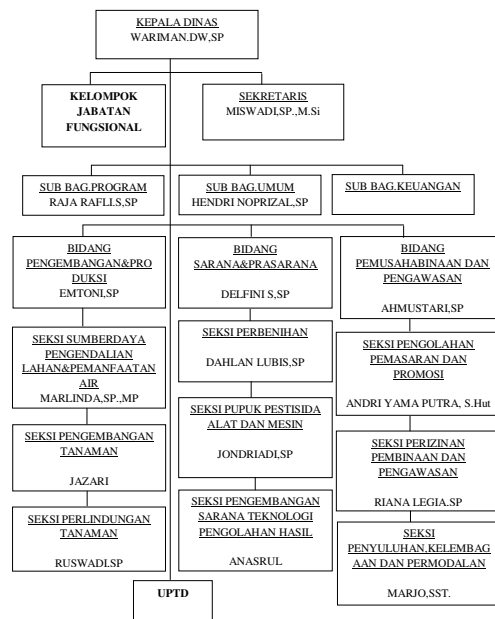
1. Menyusun rencana dan program penyuluhan kehutanan
2. Menyusun program kegiatan penyuluh kehutanan
3. Mengolah administrasi jabatan fungsional penyuluhan kehutanan
4. Melakukan pembinaan, evaluasi dan pengendalian penyuluhan kehutanan
5. Melakukan pelatihan, penyelenggaraan dan konsultasi teknis penyuluhan kehutanan

Struktur Organisasi Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi



Kepala Bidang Bina Usaha dan Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan usaha dan pengolahan hasil, pemasaran dan informasi, penyuluhan dan kelembagaan.

Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi



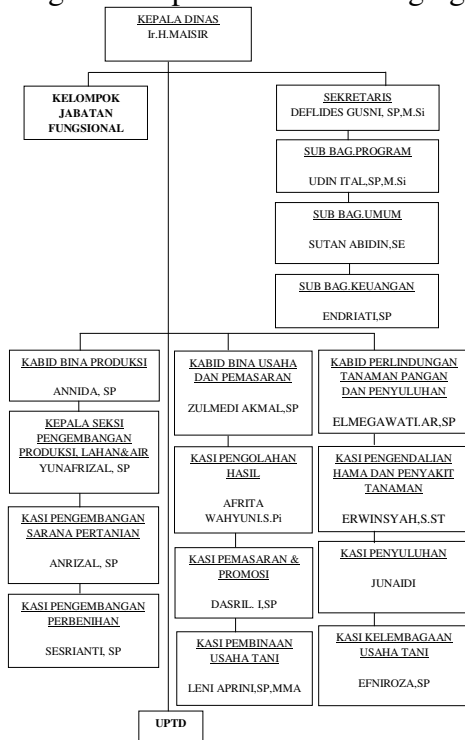
Kepala Seksi Penyuluhan Kelembagaan dan Permodalan tugas dari Kepala Penyuluhan Kelembagaan adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan pengumpulan, identifikasi, pengolahan dan penyajian data penyuluhan, kelembagaan dan permodalan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk operasional dan petunjuk teknis penyuluhan, kelembagaan dan permodalan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan anggaran penyuluhan, kelembagaan dan permodalan;
- d. Melaksanakan pemetaan kebutuhan sarana prasana penyuluhan, kelembagaan dan permodalan;
- e. Melaksanakan pengelolaan penyuluhan, kelembagaan dan permodalan

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan. Adapun fungsi Seksi Penyuluhan yang ada pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyuluhan;
- b. Penyiapan bahan penyusunan rencana program dan anggaran penyuluhan;
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penyuluhan;
- d. Penyiapan bahan pengkoordinasian pelaksanaan penyuluhan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi



Aturan Kebijakan Penyuluhan Pertanian

Aturan Kebijakan Penyuluhan Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi

Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi meliputi dari:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi melalui penataan kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur.
2. Menggalakkan Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Revitalisasi perikanan dengan titik berat pada sistem kawasan.
3. Meningkatkan penyediaan infrastruktur khususnya dibidang penyuluhan guna menunjang kegiatan perikanan.

4. Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan, SDM dan keterampilan Stekholder pembangunan perikanan

Aturan Kebijakan Penyuluhan Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi

Dinas Kahutanan Kuantan Singingi membuat kebijakan Penyuluhan Kehutanan guna mewujudkan Visi dan Misi Penyuluhan Kehutanan. Adapun kebijakan penyuluhan Kehutanan Dinas Kahutanan Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi dan peran lembaga penyuluhan kehutanan pada pemerintah, dunia usaha dan kelompok masyarakat.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM penyuluh.
3. Peningkatan metode dan materi penyuluhan kehutanan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan.

Aturan Kebijakan Penyuluhan Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi

Penyuluhan pertanian mempunyai kedudukan dan fungsi sangat strategis, yaitu sebagai penyelenggara pendidikan luar sekolah bagi masyarakat tani dan keluarganya. Penyuluhan pertanian juga berperan sebagai penggerak dalam dinamika mata rantai agribisnis melalui manajemen optimalisasi sumber daya manusia dengan pendekatan partisipatif, keterpaduan dan proses kerja metode, teknologi serta adanya dukungan fasilitas dan unsur pelayanan serta aturan yang tepat.

Aturan Kebijakan Penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi

Koordinator penyuluhan merupakan orang yang di percaya sebagai pimpinan di bidang penyuluhan, dianggap sebagai orang yang memang paham dalam bidang penyuluhan. Hal menarik pada Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi Koordinator penyuluhan tersebut ikut serta turun ke lapangan dalam menjalankan tugasnya dan merupakan salah satu kebijakan yang di terapkan oleh Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kebijakan lain yang ada pada Dinas Perkebunan adalah programa penyuluhan pertanian tidak dibuat oleh koordinator penyuluh melainkan dibuat oleh masing-masing penyuluh sesuai dengan daerah tempat binaan dari penyuluh tersebut.

Aturan Kebijakan Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi

Kebijakan merupakan rangkaian konsep yang menjadi pedoman dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan cara bertindak. Sebagai Dinas yang memiliki jumlah penyuluh terbanyak di Kabupaten Kuantan Singingi dengan jumlah 93 orang penyuluh Dinas Tanaman Pangan bisa dikategorikan sebagai Dinas yang lebih maju di banding Dinas lainnya yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis pada Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas tersebut sudah memiliki suatu programa dan programa tersebut sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai oleh Dinas. Untuk Programa sendiri Dinas Tanaman Pangan Kabupaten

Kuantan Singingi membuat secara bersamaan yang dalam artian kegiatan penyuluh saat dilapangan hampir seluruhnya membahas masalah yang sama dalam waktu yang sama pula.

Programa Penyuluhan

Programa Pembangunan Dinas Perikanan

Mengarah pada program pembangunan pertanian nasional program pembangunan perikanan Provinsi Riau dan program Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi sendiri tidak membuat programa penyuluhan melainkan membuat sejenis program pembangunan perikanan hal ini dikarenakan mekanisme kerja para penyuluh perikanan lebih mengacu kepada kondisi serta permasalahan yang dihadapi oleh peternak ikan. Apa yang menjadi masalah peternak itulah yang menjadi pokok pembahasan yang akan dibantu oleh penyuluh terhadap para peternak ikan. Mulai dari masalah budidaya sampai kepada masalah pemasaran penyuluh perikanan ikut membantu para peternak ikan.

Menurut Undang-Undang bahwa petugas penyuluh lapangan berkedudukan di tingkat desa apabila batasan desa binaan lebih dari 1 (satu) desa maka bertanggung jawab membina Wilayah Kerja Penyuluhan Perikanan (WKPP). Namun karena kekurangan petugas maka kekuatan PPL rata-rata Tahun 2015 hanya 1 (satu) PPL per-Kecamatan sehingga status PPL Perikanan menjadi PPL Koordinator dengan luas WKPP satu Kecamatan, demikian pula posisi PPL Kabupaten terpaksa kosong tidak terisi.

Belum semua metode penyuluhan dapat dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi, sebab selain ditentukan oleh kebutuhan atau tuntutan situasi kemajuan suatu wilayah juga dipengaruhi oleh keterbatasan anggaran.

Dari wawancara yang dilakukan dengan Kepala Seksi Pengembangan Budidaya bapak Aprizal. S.p.i sebagai salah satu pejabat di Dinas Perikanan Kabupaten Kuantan Singingi, dari keempat metode yang dilakukan penyuluh di lapangan, metode yang dianggap paling berhasil adalah metode pelatihan dan magang. Dalam metode ini ketua kelompok tani dibina secara singkat dan dibekali ilmu yang mana nantinya diharapkan ketua kelompok tani tersebut dapat membagi ilmunya kepada para anggotanya.

Selain dianggap lebih berhasil dibanding dengan metode penyuluhan lainnya, metode pelatihan dan magang ini dapat meminimalkan biaya karena individu yang dibina hanya ketua kelompok tani saja. Selanjutnya metode pelatihan dan magang juga sekaligus memberikan contoh nyata kepada ketua-ketua kelompok tani mengenai cara budidaya yang benar.

Programa penyuluhan Dinas Kehutanan

Tujuan penyuluhan sesuai dengan pasal 56 UU Kehutanan nomor : 41 / 1999, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar mau dan mampu mendukung pengembangan kehutanan atas dasar iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta sadar akan pentingnya sumber daya hutan bagi kehidupan manusia.

Adapun sasaran penyuluhan yang ada di Dinas Kehutanan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- a. Masyarakat yang berada didalam dan diluar kawasan hutan yang berkaitan dengan pembangunan kehutanan
- b. Kegiatan pembangunan kehutanan meliputi : pengelolaan hutan alam, pembangunan hutan tanaman, social forestry, hutan kemasyarakatan (HKM), hutan

desa/adat, hutan rakyat, aneka usaha kehutanan, perbenihan, pengelolaan Taman Nasional, kegiatan konservasi sumber daya hutan, rehabilitasi lahan, dan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS). Untuk merealisasikan sasaran penyuluhan diatas maka disusunlah program penyuluhan Dinas Kehutanan pada Tabel 1.

Tabel 1 Program penyuluhan Dinas Kehutanan Kabupaten Kauntan Singingi

No	Materi	Metode	Waktu
1.	Pembuatan Hutan Rakyat	Praktek, diskusi, tanya jawab	Oktober-Desember
2.	Pengaturan pola tanaman, lubang tanam	Praktek, tanya jawab	Oktober-Desember
3.	Pembuatan teras	Praktek, tanya jawab	Oktober-Desember
4.	Penanaman tanaman keras pada lahan bergelombang	Praktek,diskusi, tanya jawab	Oktober-Desember

Sumber : Program Dinas Kehutanan 2015

Program penyuluhan Dinas Peternakan

Programa disusun dengan melihat beberapa permasalahan yang terjadi ataupun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Penyuluh Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi adalah :

- a. Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dan keluarganya agar mau dan mampu memberdayakan dirinya ke arah usaha tani yang lebih baik dan lebih menguntungkan melalui kegiatan penyuluhan dan pembinaan secara berkelanjutan

dan berkesinambungan dengan pola pendekatan partisipatif

- b. Memperkuat kelembagaan petani dalam wadah kelompok tani, gapoktan, dan kelompok KTNA.
- c. Meningkatkan produksi pertanian dan komoditi pertanian yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan nilai strategis melalui peningkatan intensifikasi pertanian.
- d. Meningkatkan pemberdayaan sumber daya alam sesuai dengan potensi wilayah dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan kelestarian lingkungan.

Adapun program Penyuluhan Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Program Dinas Peternakan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Materi	Metode	Waktu
1.	Demplot budidaya kambing secara intensif	Diskusi dan praktek	Juni 2015
2.	Pembuatan kandang jepit di tiap kelompok	Praktek tanya jawab	February s/d Mei 2015 Juni 2015
3.	Dem cara	Diskusi dan praktek	Juli s/d Agustus 2015
4.	Penyatuan pupuk kandang pada satu tempat	Praktek ceramah tanya jawab	Maret s/d Mei 2015 April s/d Juli 2015
5.	Dem cara praktek tanya jawab	Ceramah praktek	

6.	Pemberian mineral pada ternak dan sosialisasi kesehatan	Praktek tanya jawab	Januari s/d Desember 2015
7.	Kunjungan kelompok	Penyuluhan dan praktek	Januari s/d Desember 2015
8.	Inseminasi buatan	Diskusi dan praktek	2015

Sumber : Programa Dinas Peternakan 2015

Programa Penyuluhan Dinas Perkebunan

Program penyuluhan Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi sendiri berbeda dengan dinas-dinas yang ada lainnya, hal ini ditunjukkan dengan dalam pembuatan program penyuluhan para penyuluh

membuat programnya masing-masing sesuai dengan kondisi ataupun masalah yang dihadapi oleh petani daerah binaannya.

Adapun Programa Penyuluhan yang dibuat oleh penyuluh Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat pada tabel 3 berikut :

Tabel. 3 Programa Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Materi	Metode	Waktu
1.	Membentuk kelompok usaha bersama	Ceramah dan diskusi	February
2.	Demonstrasi cara penyiapan yang baik	Ceramah diskusi	Mei
3.	Pengendalian HPT karet petani yang banyak mati di tingkat lapangan	Ceramah dan demonstrasi cara	Juni
4.	Pengendalian HPT kakao petani banyak yang rontok di tingkat lapangan	Ceramah dan praktek lapangan	Agustus
5.	Pengendalian HPT kakao petani daun rontok dan ranting lapuk di tingkat lapangan	Ceramah dan praktek kerja lapangan	September
6.	Membuat pembibitan karet	Praktek lapangan	Okt – Des

Sumber : Programa Dinas Tanaman Pangan 2015

Program Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan

Programa penyuluhan yang disusun oleh Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas. Adapun tujuan disusunnya program penyuluhan ditingkat Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2015 adalah :

- a. Menyediakan acuan dalam penyelenggaraan penyuluhan bagi para penyelenggara penyuluhan di tingkat Kabupaten
- b. Memberikan acuan bagi penyuluh di Kabupaten dalam menyusun rencana kegiatan penyuluh pertanian.
- c. Menyediakan bahan perencanaan penyuluhan untuk disampaikan

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.

Pertimbangan tujuan dan rencana kerja dibuatlah program penyuluhan dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

4. Program Dinas Tanaman Pangan Kabupaten Kuantan Singingi

No	Materi	Metode	Waktu
1.	Kiat-kiat penyuluhan	Ceramah diskusi	Januari – Juni 2015
2.	Administrasi penyuluh	Ceramah diskusi	Januari – Juni 2015
3.	Penyusunan program tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten	Rapat koordinasi penyusunan program penyuluhan	Januari – Juni 2015
4.	Identifikasi potensi wilayah melalui metode PRA	Ceramah diskusi	Januari – Juni 2015
5.	Agribisnis komoditi unggulan	Penyusunan materi	Juli – Desember 2015
6.	Informasi teknologi spesifik lokalita	Koordinasi BPTP dan penyusunan materi	Juli – Desember 2015
7.	Pembangunan pertanian di Kabupaten Kuantan Singingi	Sarasehan KTNA	Juli – Desember 2015

Sumber : Program Dinas Tanaman Pangan 2015

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta pengamatan saya di lapangan maka saya mengambil kesimpulan bahwa :

1. Semua Dinas memiliki Visi dan misi yang merupakan gambaran kinerja yang ingin dicapainya untuk periode 5 tahun semenjak Visi dan misi itu di buat. Terdapat 1 Dinas yang tidak membuat program penyuluhan pertanian yaitu pada Dinas Perikanan
2. Kelima Dinas secara garis besar memiliki, 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris, 3 orang kepala bagian serta beberapa seksi.
3. Aturan dan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing Dinas di Kabupaten Kuantan Singingi pada dasarnya adalah menekankan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kelembagaan, manajemen publik dan peningkatan pengetahuan sumber daya manusia baik di lingkungan Dinas yang ada maupun di tingkat petani.

Saran

1. Sebagai acuan dalam melaksanakan kinerja visi dan misi yang dibuat harus sejalan dengan apa yang memang

menjadi target yang akan dicapai oleh Dinas.

2. Pembuatan program penyuluhan pertanian merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan kualitas dan kinerja penyuluh dalam melaksanakan tugasnya. Namun kenyataannya masih terdapat Dinas yang tidak membuat program penyuluhan dan untuk selanjutnya akan lebih baik bila Dinas tersebut membuat program penyuluhan.
3. Kurangnya tenaga penyuluh hampir di setiap Dinas menjadi permasalahan yang belum dapat di selesaikan, dari kelima Dinas yang ada hanya terdapat pada 1 Dinas jumlah penyuluh yang sudah tercukupi. Penambahan jumlah tenaga penyuluh perlu dilakukan agar kegiatan penyuluhan dapat dilakukan lebih optimal lagi.
4. Seringnya terjadi keterlambatan pencairan dana operasional kegiatan penyuluhan sebaiknya dapat diatasi agar kegiatan penyuluhan dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

Adiwidjaja. 1977. Dasar Dasar Penyuluhan Pertanian. Bandung: Bina Cipta.

- Departemen Pertanian. 2005. Strategi dan Kebijakan Revitalisasi Penyuluhan Pertanian. Badan Pengembangan SDM Departemen Pertanian, Jakarta. Departemen Pertanian.
- Hafsah, J. 2006. Kedaulatan Pangan. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.
- Kartasapoetra.A.G.1991. Teknologi Penyuluhan Pertanian. Bumi Aksara. Jakarta.
- Nasdian, Fredian Tonny. 2008. Kelembagaan dan Tata-Pemerintahan Kecamatan : Review Implementasi dan Rekomendasi. Project Working Paper Series No.02. Kerjasama Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan, Lembaga Penelitian dan Pemberdayaan Masyarakat, Institut Pertanian Bogor dengan Democratic Reform Support Program, United States Agency for International Development.
- Peraturan Presiden Nomor 154 tahun 2014 tentang Kelembagaan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
- Sabrina, 2009. Analisis Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Provinsi Riau. Tesis. Institut Pertanian Bogor.
- Suhardiyono, L. 1990. Penyuluhan: Petunjuk bagi Penyuluhan Pertanian. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Sumardjo, Gunardi, Fredian Tonn, Ida Yuhana, Saharudin, Parulian Hutagaol dan
- Kriswantriyono. 2001. Analisis Dampak Investasi Pemerintah (APBN) terhadap Efektivitas Pelayanan Kelembagaan Pangan Nasional. Bogor. Pusat Studi Pembangunan. Lembaga Penelitian Institut Pertanian Bogor.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 16 Tahun 2006. 2006. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Jakarta. Badan Pengembangan SDM Pertanian Departemen Pertanian.